

Mahfud MD: Menegakan Hukum Tak Sama dengan Menegakan Keadilan

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, menegakan hukum berbeda dengan menegakan keadilan.

Hal itu disampaikan Mahfud saat memimpin khutbah Jum'at di Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat (28/1). "Menegakan hukum tidak selalu sama dengan keadilan. Ada hukum belum tentu ada keadilan. Bangun keadilan itu di pengadilan, tapi terkadang keadilannya bisa diatur, prosesnya bisa diatur. Hingga tidak ada lagi keadilan di pemerintahan," ucap Mahfud dalam khutbahnya.

Mahfud menambahkan, bahwa seharusnya adil dalam aturan hukum harus ada di dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

"Adil dalam aturan hukum

harus ada dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. Jika tidak ada, akan ada kesewenangan serta pengabaian hak masyarakat secara korup. Ketika pengadilan banyak yang tidak adil karena mafia hukum, hukum akan tumpul ke atas dan tajam ke bawah," kata Mahfud menegaskan.

Jika mengacu pada ajaran Agama (Islam) dan Al-Quran, banyak amanah dan perintah dari Allah SWT agar manusia berlaku adil dan menegakan keadilan.

"Dalam Quran banyak amanah dan perintah dari Allah SWT bahwa kita sebagai manusia harus adil dan menegakan keadilan. Untuk memberikan keadilan banyak jalan. Yaitu dengan menerapkan keadilan hukum, atau hukum yang berkeadilan," ucap Mahfud. ● han

Ledakan di Grobogan, Korban Luka Dilarikan ke RSUD Purwodadi

JAKARTA (IM) - Ledakan keras terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Masyru' di Desa Dusun Pesantren, Kecamatan Klambu, Grobogan, Jawa Tengah Jumat (28/1) sekitar pukul 14.00 WIB.

Dalam peristiwa tersebut satu orang terluka atas nama Azka Musyafihaka bin Magfur (18).

Dari informasi yang dihimpun, korban adalah Azka Musyafihaka (18). Korban luka itu lalu dilarikan ke RSUD Purwodadi.

Sementara itu, dari keterangan korban, dirinya membawa belerang yang ditaruh di dalam kaleng seng. Belerang itu digunakan untuk mengisir kelelawar di lantai 2 rumah. Namun, korban tak menyangka tiba-tiba terjadi ledakan.

Dari informasi yang dihimpun, ledakan terdengar dari rumah Anies Kurlia. Akibat ledakan itu, genteng dan kaca berserakan di lantai. Selain itu, muncul asap putih dari lantai 2 rumah tersebut.

Dalam peristiwa ini ada beberapa korban dalam keadaan luka-luka kemudian dibawa ke Puskesmas Klambu kemudian

di rujuk ke RSUD Purwodadi.

Polisi yang mendapatkan informasi kejadian tersebut langsung menuju lokasi kejadian. Di sana polisi mendapatkan barang bukti berupa pecahan kaca dan genteng, 2 bungkus plastik berisi serbuk belerang, 1 kardus berisi bahan petasan (paket JNE), 1 box tempat makanan terbuat dari plastik berisi bahan petasan, 1 buah HP merk Oppo, serta serpihan kaleng.

Saat ini polisi masih berkoordinasi dengan Dit Krimum dan Labfor serta memeriksa saksi-saksi.

Kapolres Grobogan AKBP Benny Setyowadi membenarkan peristiwa ledakan tersebut. "Mohon waktu nggih," kata singkatnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (28/1).

Keterangan sementara dari korban bahwa korban membawa belerang yang ditempatkan di dalam kaleng seng dengan tujuan akan digunakan untuk mengisir kelelawar di lantai 2 tetapi tidak tahu apa-apa tiba-tiba meledak. ● mei

IDN/ANTARA



PEMERIKSAAN KASUS KORUPSI PENAJAM PASER UTARA

Tersangka Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/1). Penyidik KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Abdul Gafur Mas'ud dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

KPK Periksa Istri Alex Noerdin Terkait Kasus Suap Anaknyanya

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sri Eliza, istri mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin. Sri Eliza diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat anaknya, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA).

"Hari ini, pemeriksaan saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021, untuk tersangka DRA. Pemeriksaan dilakukan di Satrimobda Sumatera Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (28/1).

Selain itu, penyidik memanggil enam saksi lainnya. Keenam saksi itu adalah Direktur Utama PT Gajah Mada Sarana, Herry Zaman; Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Musi Banyuasin, Irfan; Komisaris PT Perdana Abadi Perkasa, Sandi Swardi; Manager SDM PT Gajah Mada Sarana, Akbar Ramadhan; serta dua pihak swasta, M Nopri-ansyah dan Ahmad Sadad.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan proyek infrastruktur di daerahnya.

Putra kandung mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin tersebut ditetapkan bersama tiga orang lainnya.

Ketiga orang tersebut adalah Kadis PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayori (HM); Kabid

SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari (EU); serta Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy (SUH). Dodi Reza, Herman, dan Eddi ditetapkan sebagai penerima suap. Sementara Suhandy ditetapkan sebagai pemberi suap.

Dodi Reza diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Suhandy melalui Herman Mayori dan Eddi Umari, terkait empat paket pekerjaan infrastruktur di Musi Banyuasin. Komitmen fee yang dijanjikan Suhandy untuk Dodi Reza terkait empat proyek tersebut sebesar Rp2,6 miliar.

Suhandy diduga baru menyerahkan uang Rp270 juta sebagai realisasi komitmen fee untuk Dodi Reza kepada Herman Mayori dan Eddi Umari. Namun, uang itu belum sempat diserahkan Herman Mayori dan Eddi Umari kepada Dodi Reza karena keburu ditangkap oleh tim KPK. Uang Rp270 juta itu, merupakan realisasi awal dari komitmen fee sebesar Rp2,6 miliar.

Sementara itu, KPK masih menelusuri asal-usul uang Rp1,5 miliar yang juga turut diamankan saat menangkap Dodi Reza Alex Noerdin dan ajudannya di Jakarta.

Uang Rp1,5 miliar itu diduga juga hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Bupati Musi Banyuasin. ● han

2 | Polhukam



IDN/ANTARA

PEMERINTAH IMBAU WARGA UNTUK KURANGI MOBILITAS

Sejumlah calon penumpang menunggu kedatangan kereta di peron Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (28/1). Pemerintah mengimbau pada warga untuk mengurangi mobilitas guna menekan risiko penularan COVID-19 setelah angka kasus infeksi SARS-CoV-2 nasional bertambah 9.905 kasus menjadi 4.319.175 kasus pada Jumat (28/1).

Kajati NTT Sebut Arteria Dahlan Sangat Tendensius dan Rasis

Arteria Dahlan yang menyebut Kejati NTT, Yulianto, jaksa tukang ancam tidak boleh masuk ke Dapilnya di Jawa Timur, dinilai sangat rasis. Apalagi Yulianto adalah putra asli Jatim, tepatnya Madura.

KUPANG (IM) - Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Yulianto menilai pernyataan Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu tidak beretika. Saat itu, Arteria yang menyebut bahwa kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati NTT terhadap pengusaha

"Ini pernyataan yang tendensius dan tanpa klarifikasi," sebutnya.

Yulianto juga meluruskan pernyataan yang disampaikan Arteria bahwa ia meminta jabatan sebagai Kajati Jawa Timur. Menurutnya, saat dirinya menghadap Jamintel empat bulan lalu, dirinya ditanya keinginan setelah pindah dari NTT.

"Dan saya jawab, saya berharap kembali ke Jawa Timur. Kenapa, karena tempat kelahiran saya. Saya tidak pernah minta-minta jabatan," ujarnya.

Dia menilai pernyataan Arteria sangat rasis, sebab Arteria menilai dirinya, jaksa tukang ancam dan tidak boleh masuk ke Dapilnya di Jawa Timur. "Saya anak asli Jawa

Timur, Madura asli. Kok bisa orang Minang menolak orang asli Jawa Timur. Itu yang bilang rasis," tegasnya.

Kendatipun demikian, Yulianto, tidak bisa berbuat apa-apa dengan pernyataan Arteria Dahlan itu, karena Arteria dilindungi oleh hak imunitas.

"Dia (Arteria) dilindungi oleh hak imunitas. Apa yang bisa kita buat. Tapi saya merasa kecewa," kata Yulianto.

Terkait dugaan pemerasan senilai Rp2 miliar, Yulianto mengaku dirinya tidak pernah mengetahui hubungan antara Jaksa Kundrat Mantolas dan Hironimus Taolin, salah satu pengusaha di NTT yang terkena OTT tim Satgas 53.

"Saya tidak tahu soal jumlah uang yang katanya capai Rp2 miliar," katanya. O-han

Baru-baru ini Arteria Dahlan juga menjadi viral karena meminta Jaksa Agung mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang berbahasa Sunda saat rapat.

Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa mengatakan, Arteria agak berlebihan apabila menyampaikan hal tersebut. Ia bahkan mengira Arteria sedang kurang konsentrasi sehingga ke luar perkataan

yang kini menjadi polemik di masyarakat, terutama masyarakat Sunda.

"Menurut saya, hal-hal seperti itu harusnya tidak terjadi lah ya. Karena ini nanti akan memicu ketersinggungan. Mudah-mudahan, ini tidak membesar ya. Dan kalau memang Pak Arteria khilaf ya tinggal bicara saja," jelasnya.

Di sisi lain, ia menilai wajar apabila orang Sunda berbahasa Sunda ketika dalam rapat. Hal itu menurutnya biasa terjadi apabila orang tersebut sedang berbicara di lingkungan masyarakat Sunda. Termasuk, ketika orang itu sedang bertemu atau berbincang dengan orang sesama sukunya.

"Bahkan kalau kita datang kunjungan ke sebuah daerah misalnya Jawa Tengah, pembukaan menerima, pakai bahasa Jawa juga, walaupun kita dari mana. Kan gitu," jelasnya.

"Jadi itu kan misalnya begini, ada hal-hal yang spontan, ketika dalam komunitas yang jauh dari asal, ketemu itu kan kita spontan ya. Jadi ngomong Sunda, ngomong bahasa daerah itu kadang hal-hal yang spontan dalam sebuah forum, karena mungkin rasa senang bangga ketemu satu daerah," tambahnya. ● han

Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Dianggap Pidana yang Dipaksakan

JAKARTA (IM) - Tim kuasa hukum aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti meminta kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat kliennya dihentikan. Haris dan Fatia dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya masih berstatus saksi kendaui perkaranya telah masuk tahap penyidikan.

Kuasa hukum Fatia, Andi Muhammad Rizaldi menilai, seharusnya kejaksaan merekomendasikan kepada penyidik untuk menghentikan perkara. Sebab, Andi berpandangan, tidak terdapat unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Bagi kami, kasus yang dialami Fatia dan Haris itu bisa dimaknai sebagai pidana yang dipaksakan atau kriminalisasi," ujar Andi saat menyampaikan rekomendasi penghentian perkara, di Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kamis (27/1).

Perkara ini bermula dari diskusi antara Haris dan Fatia yang disiarkan melalui YouTube. Mereka menyoroti hasil penelitian sejumlah lembaga mengenai dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis pertambangan di Intan Jaya, Papua.

Menurut Andi, diskusi antara Haris dan Fatia merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

"Ini sebagai bentuk partisipasi

warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan juga hak asasi manusia," kata Andi.

Hal senada disampaikan kuasa hukum Haris, Muhammad Al Ayuubi Harahap. Dia mengatakan, percakapan Haris dan Fatia berlandaskan pada hasil kajian dari beberapa organisasi sipil. Adapun pokok pembicaraan Haris dan Fatia berdasarkan hasil laporan YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, hingga Trend Asia, bertajuk Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya.

Kajian ini memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerujan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Dalam laporannya, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi, yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qur'ata 'Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Penambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).

Dua dari empat perusahaan itu, yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qur'ata 'Ain (PTMQ), adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi.

Setidaknya, ada tiga nama aparat yang terhubung dengan

PTMQ, yakni purnawirawan polisi Rudiard Tampubolon, purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Luhut.

"Itu merupakan murni atas ungkapan dari hasil riset kajian yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mengarah adanya dugaan konflik kepentingan bisnis pejabat publik di Papua," kata Ayuubi.

Sebelumnya, Luhut telah membantah tuduhan melakukan kriminalisasi terhadap Haris dan Fatia. Tuduhan itu disampaikan oleh Julius Ibrani, salah satu anggota tim kuasa hukum Fatia.

"Tidak ada urusan ke situ. Saya tidak sempat waktu mikir ke situ, kerjaan saya sudah banyak," kata Luhut, di Polda Metro Jaya, Rabu (22/9).

Luhut melaporkan Haris dan Fatia karena beranggapan bahwa pernyataan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengaku telah meminta bukti hasil riset kepada Haris dan Fatia.

"Saya punya hak untuk bela hak asasi saya. Saya sudah minta bukti-bukti, (Haris dan Fatia) tidak ada. Dia bilang riset, tidak ada," kata Luhut.

"Saya mau menunjukkan kepada publik supaya manusia-manusia yang merasa publik figur itu menahan diri untuk memberikan statement tidak bertanggung jawab," ucapnya. ● mei



IDN/ANTARA

KASUS COVID-19 DI INDONESIA

Petugas PMI Jakarta Selatan menyemprotkan cairan disinfektan di SMA Negeri 66 Jakarta, Jumat (28/1). Satgas Penanganan COVID 19 melaporkan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia per Jumat 28 Januari 2022 bertambah sebanyak 9.905 kasus, sementara itu DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus konfirmasi positif terbanyak sebesar 4.558 kasus.